

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN  
PERKEBUNAN TA. 2019**



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN  
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
2020**

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisikan pelaksanaan tugas pokok dan peran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam meningkatkan peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional, meningkatkan penguasaan pasar di dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta menguatkan struktur industri hasil hutan dan perkebunan.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan selama tahun 2019, juga sebagai informasi dalam meneruskan dan meningkatkan pembinaan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini saya selaku pimpinan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2019 dapat terlaksana dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat-Nya kepada kita dalam memajukan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagai Kekuatan Ekonomi dan Industri Nasional.

Jakarta, 15 Januari 2020

Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

TTD

 Edy Sutopo

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro pada Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran akuntabilitas kinerja ini didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2019. Dokumen perjanjian kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2015-2019 Perubahan.

### **A. Akuntabilitas Kinerja**

Secara umum Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2019. Pada Tahun Anggaran 2019, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang dilihat dari sisi tujuan, 2 (dua) sasaran strategis yang dilihat dari perspektif pemangku kepentingan, 1 (satu) sasaran strategis dari perspektif proses internal dan 1 (satu) sasaran dari perspektif pembelajaran organisasi, dengan IKU dan targetnya masing – masing. Pada Perjanjian Kinerja 2019, perspektif tujuan terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator kinerja, perspektif pemangku kepentingan terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang tidak dapat tercapai pada Tahun Anggaran 2019 adalah capaian Nilai Investasi sektor industri hasil hutan dan

perkebunan besar sedang yang tumbuh. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh:

1. Faktor yang berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan realisasi investasi adalah pertumbuhan ekonomi dunia yang melemah (proyeksi Lembaga Moneter Internasional yakni IMF (*International Monetary Fund*) yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di 2019 menjadi 3% dari sebelumnya 3,2%) tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan volume perdagangan akibat ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok serta berkurangnya kegiatan produksi di banyak negara. faktor ini sangat berdampak terhadap investasi, selain iklim investasi dan regulasi terkait investasi.
2. Investasi yang melambat juga dipengaruhi oleh regulasi yang terkait penanaman modal, kedua adalah regulasi perpajakan, ketiga adalah perizinan lahan di daerah, keempat adalah regulasi tentang ketenagakerjaan. sehingga realisasi investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing akan sulit dicapai.

Indikator lain yang secara tidak langsung terkait justru menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu kontribusi ekspor komoditi industri hasil hutan dan perkebunan;

1. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional pada tahun 2019 adalah sebesar 17,61% dari yang ditargetkan sebesar 10,48%. Kenaikan nilai ekspor juga dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas. Sebab, ekspor Indonesia masih sebagian besar berasal dari komoditas seperti batubara, nikel dan tembaga. Berdasarkan data BPS, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari– November 2019 turun 3,55 persen dibanding periode yang sama tahun 2018, dan ekspor hasil tambang dan lainnya turun 16,35 persen. Sementara ekspor hasil pertanian naik 3,50 persen. Sementara itu, Ekspor nonmigas November 2019 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US\$2,42 miliar, disusul Amerika Serikat US\$1,48 miliar dan Jepang US\$1,11 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 38,81 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US\$1,14 miliar.
2. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan yang signifikan mengikuti peningkatan produksi dan

ekspor sektor pengolahan, yaitu sebesar Rp 319,57 juta per orang per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditargetkan sebesar Rp 288,1 juta per orang per tahun.

Selain sasaran strategis di atas, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang dijadikan indikator kinerja tujuan dengan 3 (tiga) indikator kinerja tujuan. Indikator tujuan tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu: Kontribusi PDB Industri pengolahan hasil hutan terhadap PDB nasional yang ditargetkan 1,6 persen pada tahun 2019, terealisasi sebesar 1,44 persen. Laju pertumbuhan PDB yang ditargetkan sebesar 2,54 persen terealisasi sebesar 2,07 persen. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh:

1. Kontribusi PDB Industri pengolahan hasil hutan terhadap PDB nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, sedikit pengaruh negative, maka akan sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Hilirisasi industri belum berjalan efektif, banyak faktor yang mempengaruhi program hilirisasi, yaitu; regulasi terkait bahan baku, tata niaga terkait bahan baku, regulasi mengenai pengelolaan lahan, dan hal lain yang terkait.
2. Indonesia merupakan negara dengan bahan baku industri yang melimpah, namun belum dapat memanfaatkan dengan baik, sehingga bahan baku tersebut memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan memiliki harga produk yang lebih stabil pada perdagangan internasional. Keterbatasan hilirisasi tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah regulasi dari instansi-instansi terkait, bukan hanya di Kementerian Perindustrian.

Hal tersebut mempengaruhi kinerja industri pengolahan, khususnya sektor hasil hutan dan perkebunan, memiliki kontribusi PDB sebesar 1,44 persen dari yang ditargetkan sebesar 1,6 persen begitu juga terhadap penyerapan tenaga kerja, produktifitas yang pertumbuhannya tidak tinggi berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang rendah.

Rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan” dan “Kinerja Tujuan” adalah dengan cara terus menerus

melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis dimaksud, adapun Output kegiatannya yang ingin dicapai antara lain:

- Investment Catalogue Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Sni Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Perusahaan Berbasis Hasil Hutan Dan Perkebunan Yang Menerapkan Standar Mutu
- Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional
- Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional
- Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha
- Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar Dan Tarif Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional
- Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon
- Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional
- Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan.

## **B. Akuntabilitas Keuangan**

Pada Tahun 2019, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp 18.825.484.000,-**. Anggaran ini alokasikan untuk membiayai 2 (dua) program/kegiatan, yaitu Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dan Peningkatan Kompetensi SDM Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan.

Realisasi anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp. 17.494.379.469,-** atau sebesar **92,93** persen, dengan capaian fisik sebesar **91,28** persen.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	2
C. Peran Strategis.....	3
D. Struktur Organisasi .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Rencana Strategis.....	17
B. Rencana Kinerja.....	31
C. Perjanjian Kinerja .....	36
D. Rencana Program/Kegiatan .....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	44
A. Analisis Capaian Kinerja Dit. IHHP .....	44
B. Analisis Capaian Kinerja Rencana Strategis Dit IHHP .....	56
C. Analisis Capaian Kinerja Program Prioritas .....	59
D. Akuntabilitas Keuangan Dit. IHHP.....	63
BAB IV PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Permasalahan dan Kendala .....	67
C. Rekomendasi.....	68

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1.	Industri Binaan Dit. IHHP Berdasarkan KBLI.....	4
Tabel II.1	Rencana Aksi Pembangunan Industri Prioritas.....	22
Tabel II.2.	Tahapan Pembangunan Industri Prioritas Industri Furniture & Barang Lain dari Kayu.....	24
Tabel II.3.	Tahapan Pembangunan Industri Prioritas.....	26
Tabel II.4.	Target IKU Dit. IHHP 2017 - 2019.....	39
Tabel II.5	Target IKT Dit. IHHP 2017 – 2019.....	30
Tabel II.6	Target Indikator Pembangunan 2015 – 2019.....	30
Tabel II.7	Rencana Kinerja Sasaran Strategis .....	34
Tabel II.8	Rencana Kinerja Pembangunan (RPJM) .....	35
Tabel II.9	IKU Sasaran Strategis Perspektif Stakeholders.....	36
Tabel II.10	Rencana Anggaran Dit. IHHP Tahun 2019 .....	37
Tabel III.1.	Realisasi IKT Dit. IHHP Tahun 2019.....	45
Tabel III.2	Pertumbuhan IHHP 2014 - 2019.....	47
Tabel III.3	Kontribusi IHHP Terhadap PDB Nasional Tahun 2019 .....	47
Tabel III.4	Realisasi IKU Meningkatnya Populasi.....	49
Tabel III.5	Realisasi IKU Meningkatnya Daya Saing .....	52
Tabel III.6	Realisasi IKSS Terlenggaranya Urusan Pemerintahan.....	53
Tabel III.7	Realisasi IKSS Tersusunnya Perencanaan Program.....	54
Tabel III.8	Capaian Indikator Kinerja Perkin Berdasarkan Perspektif.....	55
Tabel III.9	Realisasi Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	55
Tabel III.10	Realisasi Indikator Kinerja Renstra 2015 – 2019 .....	56
Tabel III.11	Capaian Indikator Kinerja Renstra Berdasarkan Perspektif .....	57
Tabel III.12	Realisasi Indikator Pembangunan (RPJM) .....	58
Tabel III.13	Capaian Indikator Pembangunan (RPJM) berdasarkan Sasaran Strategis.....	59
Tabel III.14	Realisasi Target Program Prioritas .....	60
Tabel III.15	Realisasi Anggaran Sasaran Strategis.....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat IHHP.....	16
Gambar 2. Peta Strategi Dit. IHHP 2015 – 2019.....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Tugas pokok Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Melalui tugas pokok tersebut diharapkan dengan melakukan pembinaan terhadap industri hasil hutan dan perkebunan industri tersebut tumbuh dan berkembang, selain itu bahan baku khususnya dari hasil kehutanan dan perkebunan yang tersedia cukup banyak di dalam negeri, dapat diproses lebih lanjut sehingga nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa.

Pembinaan tersebut dilakukan kedalam berupa peningkatan sumber daya manusia dan upaya peningkatan pelayanan baik untuk internal Kementerian Perindustrian, instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu pembinaan dilakukan pula terhadap dunia usaha, baik berupa upaya peningkatan iklim usaha, peningkatan teknologi dan mutu produk, peningkatan kerjasama antara industri dengan penyediaan bahan baku dan melakukan promosi produk-produk serta berupaya untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh internal kementerian, instansi terkait, dunia usaha, maupun masyarakat pada umumnya.

Untuk mengetahui program pembinaan yang telah dilakukan oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang telah dicapai berupa perkembangan industri hasil hutan dan perkebunan dalam kurun waktu satu triwulan terakhir, kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh industri hasil hutan dan perkebunan serta program-program yang akan dilakukan satu triwulan kedepan maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

## **B. Tugas dan Fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan merupakan salah satu unit di Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Serta dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, bahwa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- d. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
- e. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;

- f. Pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Struktur Organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai 4 (empat) Sub Direktorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu :

1. Sub. Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
2. Sub. Direktorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya;
3. Sub. Direktorat Industri Selulosa dan Karet Hulu;
4. Sub. Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan; dan
5. Sub. Bagian Tata usaha.

### **C. Peran Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

Sebagai bagian dari Industri Nasional, maka Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan industri nasional secara keseluruhan. Hal ini mengingat bahwa Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan merupakan industri yang mengolah hasil hutan dan perkebunan yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari dalam negeri, sehingga diharapkan industri hasil hutan dan perkebunan mampu meningkatkan nilai tambah yang tinggi di dalam negeri, serta mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi peningkatan ekspor nasional, mengurangi impor, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta mendorong pengembangan investasi di bidang Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, untuk mewujudkan peran pembinaan tersebut, maka peran Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan meliputi Pembinaan Industri sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/9/2011 yaitu:

**Tabel. I.1.**  
**Industri Binaan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

KBLI	Uraian
	<b>Furniture Kayu</b>
31001	Industri Furniture dari Kayu
	<b>Kayu Olahan Lainnya</b>
16102	Industri pengawetan Kayu
16213	Industri Panel Kayu Lainnya
16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu
16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu
16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
16230	Industri Wadah dari Kayu
16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebel
16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
16299	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus lainnya ytdl
	<b>Furniture Rotan</b>
31002	Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu
	<b>Rotan Olahan Lainnya</b>
16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya
16104	Industri Pengolahan Rotan
16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Rotan dan Bambu
	<b>Pulp</b>
17011	Industri Bubur Kertas (pulp)
	<b>Kertas</b>
17012	Industri Kertas Budaya
17013	Industri Kertas Berharga
17014	Industri Kertas Khusus
17019	Industri Kertas Lainnya
17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
17091	Industri Kertas Tissue
	<b>Industri Terkait Kertas</b>
17022	Industri Kemasan dan Kotak Dari Kertas dan Karton
17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Dari Kertas ytdl
18111	Industri Percetakan Umum
18112	Industri Percetakan Khusus
18120	Jasa Penunjang Pencetakan
82920	Jasa Pengepakan
	<b>Karet</b>
22121	Industri Pengasapan Karet
22122	Industri Remiling Karet
22123	Industri Karet Remah (crumb rubber)
	<b>Oleokimia dan Atsiri</b>
20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari hasil Perkebunan:
	• Fatty alcohols,

20294	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatty amine,</li> <li>• Methyl ester sulfonat/biosurfactant,</li> <li>• Biolubricant/rolling oils,</li> <li>• Glycerine based chemical,</li> <li>• Isopropil palmitat(IPP),</li> <li>• Isopropil miristat(IPM),asam stearat/stearic acid,</li> <li>• Biodiesel</li> <li>• Bioetanol</li> <li>• Bioavtur</li> <li>• Biogas dari palm oil mill effluent (POME)</li> <li>• Biomaterial untuk peralatan medis,</li> <li>• Aromatic Building block berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi</li> <li>• Bioetanol berbahan baku lignosa dan limbah biomassa)</li> </ul> <p><b>Industri Minyak Atsiri</b></p>
-------	--

Adapun kelemahan dan kekuatan industri hasil hutan dan perkebunan dapat dilihat di bawah ini.

### **Industri Furniture**

#### Kekuatan

1. Industri furniture memiliki nilai tambah tertinggi dibandingkan industri pengolahan kayu lainnya.
2. Adanya Pusat Desain Furniture Kayu di Jepara.
3. Adanya terminal kayu di beberapa daerah (di Jateng dan Sulut).
4. Banyaknya jumlah perajin furniture di Indonesia.
5. Masih adanya hutan (HPH, HPK, Perhutani, Hutan Rakyat) sebagai sumber bahan baku.
4. Masih adanya potensi pengembangan bahan baku alternatif (spt: kayu kelapa sawit yg tdk produktif lagi, kayu karet,dll).

#### Kelemahan

1. Lokasi pusat-pusat industri furniture pada umumnya berjauhan dengan lokasi sumber-sumber bahan baku kayu.
2. Makin terbatasnya pasokan bahan baku kayu dengan kualitas yang baik
3. Terbatasnya SDM yang menguasai bidang desain dan teknik produksi.
4. Terbatasnya penguasaan teknologi kayu *engineering (finger joint, laminating)*.
5. Belum optimalnya peranan Pusat Desain dan Terminal Kayu

6. Terbatasnya pameran produk-produk furniture.

#### Kesempatan

1. Besarnya permintaan di DN dan ekspor.
2. Furniture masuk kelompok industri kreatif dan *fashionable*, dinamika pasar cukup tinggi.
3. Pasar Eropa, AS dan Jepang mulai menerapkan regulasi terkait legalitas kayu dan di Indonesia telah memiliki SVLK untuk menembus pasar tersebut

#### Hambatan/Gangguan

1. Tuntutan masalah lingkungan dan *Negative campaign*.
2. Persaingan dengan produk-produk sejenis dari impor.
3. Banyaknya retribusi daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

### **Industri Pengolahan Rotan**

#### Kekuatan

1. Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia. Diperkirakan 85% bahan baku rotan di seluruh dunia dihasilkan oleh Indonesia.
2. Ada kebijakan larangan ekspor rotan asalan, sehingga dapat membantu ketersediaan bahan baku di dalam negeri.
3. Adanya insentif investasi berupa *Tax Allowance*.
4. Adanya Pusat Desain Furniture Rotan di Cirebon.
5. Bahan baku rotan masuk kategori ramah lingkungan.

#### Kelemahan

1. Belum adanya litbang yang khusus meneliti mengenai pemanfaatan rotan, sehingga belum semua rotan yang tumbuh di Indonesia dapat dimanfaatkan.
2. Kurangnya dukungan lembaga Litbang terkait desain dan teknik produksi serta finishing.
3. Terbatasnya SDM yang menguasai bidang desain dan proses produksi.
4. Belum berkembangnya industri pendukung/penunjang seperti: peralatan/permesinan, pisau, cat dan lain-lain yang selama ini banyak dipenuhi dari impor.

#### Kesempatan

1. Peluang pasar furniture rotan, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Saat ini terdapat 350 spesies rotan yang terdapat di Indonesia, dan baru sekitar 53 spesies yang memiliki nilai komersial dan dimanfaatkan oleh industri.

#### Hambatan/Gangguan

1. Masih adanya penyelundupan rotan.
2. Persaingan dengan produk-produk sejenis (khususnya dari China).
3. Adanya saingan dengan rotan sintesis.
4. Habitat rotan mulai tergantikan oleh kegiatan ekonomi lain misalnya perkebunan dan pertanian

### **Industri Pulp Dan Kertas**

#### Kekuatan

1. Daya saing industri pulp & kertas Indonesia cukup tinggi (pulp serat pendek No. 8 dunia, dan kertas No. 6 dunia).
2. Iklim tropis yg memungkinkan tanaman dpt tumbuh lebih cepat.
3. Adanya potensi pengembangan bahan baku (HPK masih cukup luas).
4. Potensi bhn baku non-kayu (abaka, tandan kosong kelapa sawit, dll).
5. Teknologi proses pulp dan kertas telah dikuasai dan hampir semua jenis kertas sudah dapat diproduksi di dalam negeri.
6. Dukungan BBPK dan ATPK.

#### Kelemahan

1. Masih tingginya impor pulp serat panjang.
2. Belum dikuasainya teknologi rancang bangun dan perekayasaan permesinan pulp & kertas.
3. Sulitnya proses perizinan perolehan HTI baru.
4. Masih rendahnya pengumpulan kertas bekas di dalam negeri, sehingga impornya masih tinggi.

#### Kesempatan

1. Jumlah penduduk yg besar dan konsumsi kertas per kapita di Indonesia masih rendah yaitu baru 32,6 kg.
2. Menurunnya peranan NORSCAN (North Scandinavia) sebagai penyuplai utama pulp dan kertas dunia.

#### Ancaman



1. Tuntutan lingkungan (*eco-label*).
2. Berkembangnya teknologi informasi mengarah ke *paperless*.
3. ketentuan impor limbah non B3 dimana kertas bekas sebagai bahan baku industri pulp dikategorikan sebagai limbah

### **Industri Hilir Kelapa Sawit**

#### Kekuatan

1. Luas Kebun
2. Tenaga kerja tersedia
3. Penguasaan Teknologi kebun dan Industri
4. Komitmen dan Standar Lestari (ISPO)
5. Kapasitas terpasang Biodiesel dan Minyak Goreng nasional cukup besar, peluang pertumbuhan masih terbuka lebar
6. Rantai Nilai Produk masih terbuka lebar

#### Kelemahan

1. Produktifitas kebun Relatif Rendah
2. Infrastruktur pendukung masih kurang
3. Diplomasi perlu ditingkatkan
4. Ketergantungan lisensi Teknologi industri hilir
5. Tenaga Kerja terampil dianggap masih kurang
6. Industri 2nd generation biodiesel belum berkembang dengan baik di Indonesia

#### Kesempatan

1. Dukungan Kebijakan Pemerintah
2. Penyerapan pasar domestic dan regional ASEAN
3. Pola Kerjasama bidang sawit (contoh: CPOPC)
4. Mandatory Biodiesel di dalam negeri
5. Dukungan Dana Perkebunan Sawit.
6. Keinginan investor masuk di bidang industri pengolahan masih tinggi.

#### Strategi Maksimalisasi Kekuatan melalui Optimalisasi Peluang

1. Penambahan kebun/industri yang bersertifikat ISPO khususnya di luar Jawa

2. Penguasaan teknologi dan kemampuan SDM industri hulu - hilir dengan dukungan Dana Perkebunan.
3. Pengembangan industri hilir sawit sesuai rantai nilai (oleokimia dan *bioenergy*).
4. Peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan biodiesel dalam negeri.
5. Pembentukan paket investasi Industri hilir yang *sustainable* dalam kerangka CPOPC.
6. Pengembangan produk distinctive dari minyak sawit yaitu, minyak goreng merah, *golden nutrient*, dsb.

Strategi Minimalisasi Kelemahan melalui Optimalisasi Peluang

1. Program *Replanting* kebun tua didukung dana perkebunan sawit.
2. Penguatan kapasitas riset dan SDM perkelapasawitan dalam negeri via CPO Fund
3. Perbaikan infrastruktur kebun dan pendukung industri hilir khususnya pelabuhan dan kawasan industri kelas dunia dalam format PPP (Public Private partnership)
4. Peningkatan upaya diplomasi dan *anti negative campaign* bersama negara2 dalam kerangka CPOPC.
5. Pengembangan teknologi *biofuel 2nd generation (green diesel)*.
6. Mengarahkan masuknya investasi di sektor infrastruktur kelas dunia

**D. Struktur Organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

Struktur organisasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tercermin pada Tugas dan Fungsi masing-masing Sub Direktorat sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan; dan
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dibantu oleh:

- 1) Seksi Program yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.
  - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.
2. Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya; dan

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sub Direktorat Industri Kayu, Rotandan Bahan Alam Lainnya dibantu oleh:

- 1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.
- 2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kayu, rotan, dan bahan alam lainnya.

5. Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu; dan
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu dibantu oleh:

- 1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah

pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri selulosa dan karet hulu.

2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri selulosa dan karet hulu.

6. Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,

kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil perkebunan non pangan; dan

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan non pangan.

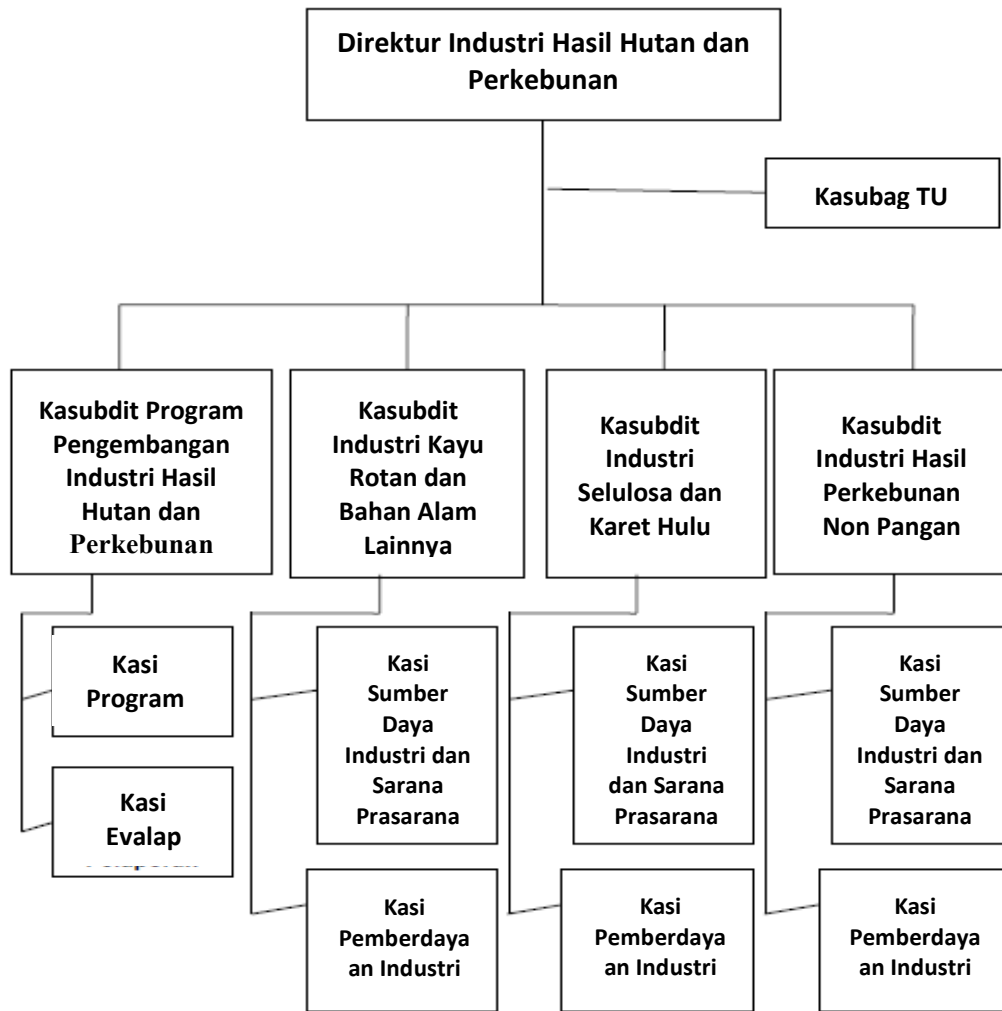
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Subdirektorat Industri Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dibantu oleh:

- 1) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil perkebunan nonpangan.
- 2) Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan

penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industrihijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil perkebunan non pangan.

7. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.





**Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun untuk dijadikan sebagai alat bantu melaksanakan tugas, fungsi dan pogram kegiatan dan merupakan tolok ukur pencapaian sasaran dan kinerja.

#### 1. Visi

“Mewujudkan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam”.

#### 2. Misi

- 1) Meningkatkan populasi industri untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri hasil hutan dan perkebunan;
- 2) Meningkatkan daya saing dan produktivitas industri untuk mewujudkan industri hasil hutan dan perkebunan yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.

#### 3. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menetapkan tujuan pembangunan yang akan dicapai sampai tahun 2019, yaitu **Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam Perekonomian Nasional**, dengan indicator kinerja tujuan, yaitu:

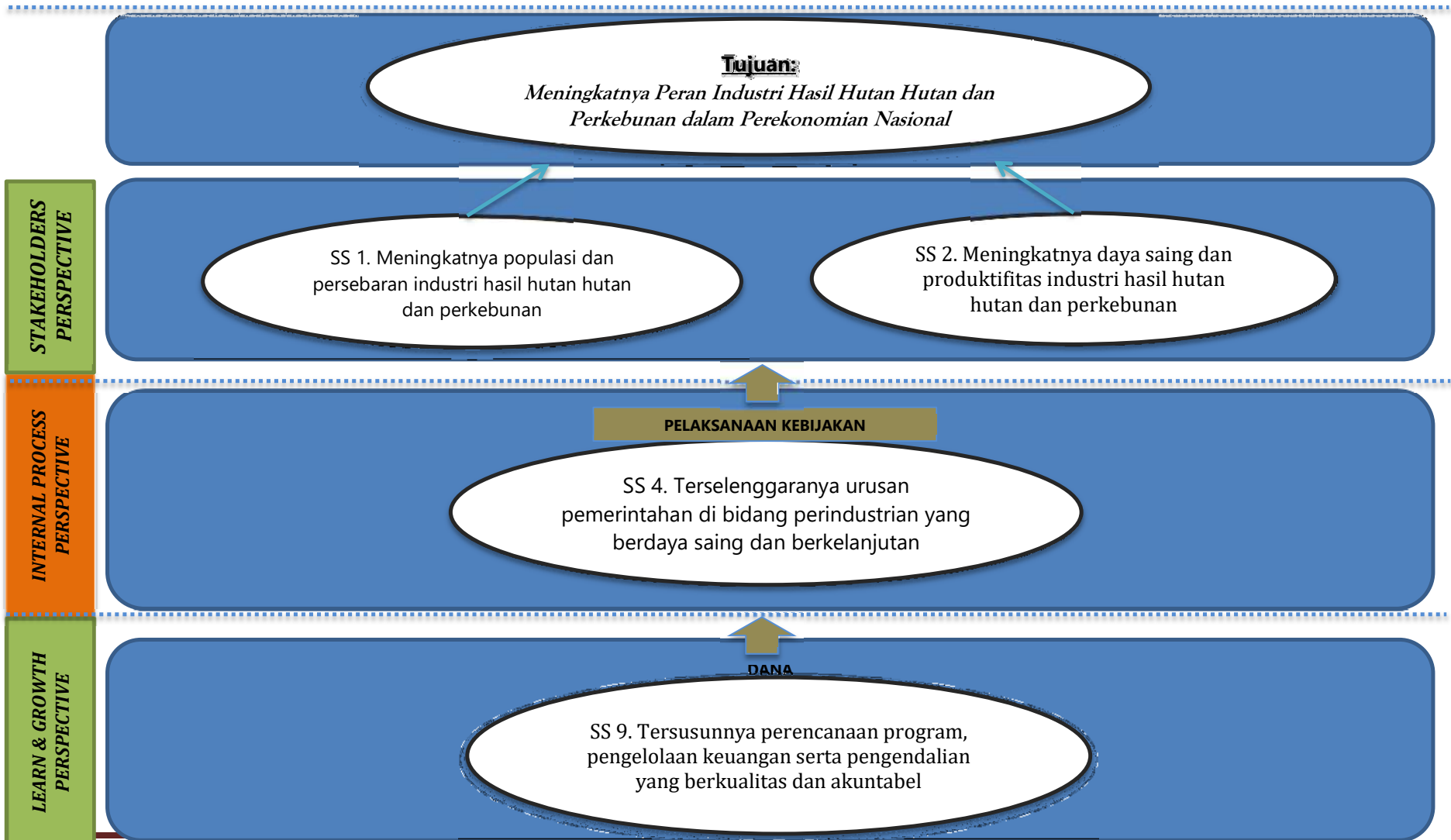
- 1) Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan
- 2) Kontribusi PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional
- 3) Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan

Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

4. **Peta Strategi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Perindustrian, telah dibangun Peta Strategi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang mengacu pada visi dan misi Kementerian Perindustrian. Berikut ini peta strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran strategis dan faktor-faktor yang mendukung pencapaiannya.

## PETA STRATEGI DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019



## 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 ditetapkan visi pembangunan industri tahun 2015 - 2019 yaitu **“Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam”** dengan fokus prioritas pembangunan industri agro. Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, visi dan misi yang diemban serta mempertimbangkan tantangan-tantangan, permasalahan dan peluang yang ada, maka sebagai **Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Industri hasil hutan dan perkebunan adalah indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif Stakeholders/ pemangku kepentingan, yaitu:**

- 1) Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh
- 2) Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan
- 3) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional
- 4) Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan

## 6. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang akan diwujudkan sampai dengan tahun 2019 adalah:

- 1) Meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan
- 2) Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
- 3) Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
- 4) Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

- Sasaran 1: Meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan Perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu:
- Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh
  - Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan
- Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu:
- Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya
  - Produktivitas SDM industry hasil hutan dan perkebunan
- Sasaran 3 : Terlenggaranya urusan pemerintahan dibidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu:
- Infrastruktur kompetensi yang terbentuk
- Sasaran 4: Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu:
- Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang diblokir

Sasaran-sasaran tersebut merupakan sasaran strategis dalam cakupan pemangku kepentingan dan proses bisnis internal. Melalui sasaran-sasaran tersebut diharapkan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian.

## **7. Arah, Kebijakan, dan Strategi Pembangunan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 maka arah kebijakan dan strategi adalah pembangunan industri prioritas. Pembangunan industri prioritas periode tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Rencana aksi pembangunan untuk masing-masing industri prioritas

hasil hutan dan perkebunan dapat dilihat sebagaimana tabel berikutkecuali point (d) Industri Pakan (ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture) merupakan industri binaan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

**Tabel II. 1.Rencana Aksi Pembangunan Industri Prioritas IHHPTahun 2015-2019**

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
1.	<p>INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KALI DAN ANEKA</p> <p><b>Industri furnitur dan barang lainnya dari kayu:</b> kerajinan, ukir-ukiran dari kayu, furnitur kayu dan rotan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap IKM dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK);</li> <li>2. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir;</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk;</li> <li>4. Memfasilitasi pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan dan furniture;</li> <li>5. Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif dari (kayu sawit, kayu karet, dsb);</li> <li>6. Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur;</li> <li>7. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furniture rotan dalam negeri.</li> </ol>
2.	<p><b>INDUSTRI HULU AGRO</b></p> <p>a. <b>Industri Oleofood:</b> Olein, stearin, gliserol, Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), coco butter substitute, margarin, shortening, other specialty fats.</p> <p>b. <b>Industri Oleokimia:</b> Asam lemak nabati, fatty alcohols fatty amine, methyl ester sulfonat (biosurfactant), biolubricant (rolling oils), gliserin yang berbasis kimia (glycerine based chemicals), Minyak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai.</li> <li>2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui diklat industri.</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</li> <li>4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan dan furniture, serta perlindungan HKI.</li> <li>5. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu</li> </ol>

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
	atsiri, Isopropil palmitat (IPP), dan Isopropil Miristat (IPM), Asam stearat (stearic acid) c. <b>Industri Kemurgi:</b> Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/ FAME), Bioavtur (Bio jet fuel). d. <b>Industri Pakan:</b> Ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture. e. <b>Industri Barang dari Kayu:</b> Komponen berbasis kayu (wood working, laminated & finger joint). f. <b>Industri Pulp dan Kertas:</b> Long fiber, Dissolving pulp.	6. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk. 7. Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk bioenergi. 8. Memberikan insentif khusus untuk industri bioenergi 9. Promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri. 10. Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan <i>Palm Oil Mill Effluent(POME)</i> terintegrasi dengan Pabrik Kelapa Sawit untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas.

Untuk lebih jelasnya pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan diarahkan pada:

### 1. Industri Furniture Kayu

- a) Mendukung pengembangan pemanfaatan teknologi kayu *engineering*.
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan terminal-terminal kayu yang telah ada dan mengembangkan terminal kayu baru di daerah-daerah pusat pengembangan industri furniture yang jauh dari sumber bahan baku kayu.
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Desain Furniture Kayu
- d) Memperbanyak frekwensi lomba desain furniture kayu.
- e) Meneruskan pelaksanaan program pameran di dalam dan di luar negeri untuk pengembangan akses pasar dan memelihara konsumen tradisional.
- f) Memperbanyak pelatihan di bidang proses produksi dan desain furniture kayu.

### 2. Industri Pengolahan Rotan

- a) Mempertahankan kebijakan larangan ekspor rotan asalan.



- b) Mengoptimalkan pemanfaatan terminal-terminal rotan di daerah-daerah sumber bahan baku.
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Desain Furniture Rotan.
- d) Memperbanyak frekwensi lomba desain furniture rotan.
- e) Meneruskan pelaksanaan program pameran di dalam dan di luar negeri untuk pengembangan akses pasar dan memelihara konsumen tradisional.
- f) Memperbanyak pelatihan di bidang proses produksi dan desain furniture rotan.

**Tabel II. 2. Tahapan Pembangunan Industri Prioritas**  
(RIPIN Tahun 2015-2035, PP No 14 Tahun 2015)

Tahapan Pembangunan Industri Furnitur		
2015-2019	2020-2024	2025-2035
<b>Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu</b>		
1.Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu, 2.Furniture kayu dan rotan	1.High tech furniture kayu dan rotan bersertifikat industri hijau 2.Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	High value kerajinan dan furniture

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri nasional dilakukan program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Program pengembangan industri prioritas disusun untuk periode 2015-2019 dan periode 2020-2035 sebagai berikut:

**Periode 2015-2019**

- a) Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri menengah dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK);

- b) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir;
- c) Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk;
- d) Memfasilitasi pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan, dan furnitur;
- e) Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif antara lain dari kayu sawit dan kayu karet;
- f) Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur;
- g) Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furnitur rotan dalam negeri

#### **Periode 2020-2035**

- a) Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai;
- b) Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan desain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;
- c) Meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/rotan;
- d) Mengembangkan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri furnitur.

### 3. Industri Pulp dan Kertas

**Tabel II. 3. Tahapan Pembangunan Industri Prioritas**  
(RIPIN Tahun 2015-2035, PP No 14 Tahun 2015)

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		Industri Pulp dan Kertas		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
1.	Industri Hulu Agro	1. <i>Long Fiber</i> 2. <i>Dissolving pulp</i>	Pulp dan aneka barang kertas diproduksi secara ramah lingkungan	<i>microbial cellulose fiber</i>

#### Periode 2015-2019

- a) Pada tahun 2015 telah dibentuk LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) Pulp dan Kertas dalam rangka mengimplementasikan SKKNI yang telah ditetapkan sebanyak 105 unit kompetensi industri pulp dan kertas
- b) Telah disusun Draft Regulasi Teknis Produk Kertas dan Karton Kemasan Pangan dan diharapkan pada pertengahan 2016 telah dapat diaplikasikan oleh industri pulp dan kertas dan telah disusun 10 RSNi untuk industri pulp dan kertas
- c) Pada tahun 2015 telah masuk investasi baru untuk pembangunan pabrik PT. Sateri Viscose International di Provinsi Riau dengan nilai investasi US\$1.130.000.000 dan kapasitas produksi 350 ribu ton/tahun dissolving pulp untuk rayon dan 250 ribu ton pulp untuk High-grade digital paper dan merupakan pabrik yang memproduksi bahan baku rayon pertama di Indonesia
- d) Pada tahun 2016 proses pembangunan pabrik pulp dan kertas PT. OKI Pulp dan Kertas telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2017 dengan nilai investasi US\$ 3.100.000.000 dan dengan kapasitas produksi pulp 2 juta/tahun dan produksi kertas tissue 500 ribu ton/tahun dan telah mendapatkan fasilitas *tax holiday*.

#### 4. Industri Hilir Kelapa Sawit

Regulasi Pemerintah:

- a. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Industri Pengolahan Minyak Sawit masuk dalam RIPIN (Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional), mendapatkan Prioritas Pengembangan oleh Pemerintah melalui Insentif Investasi dan fasilitasi lainnya.
- b. Peraturan Menteri Perindustrian No. 13 Tahun 2010 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit

Sasaran Jangka Menengah (2010-2014):

- Terbentuknya Klaster/Kawasan Industri Hilir Kelapa Sawit di Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Timur
- Pembentukan iklim usaha dan investasi yang kondusif

Sasaran Jangka Panjang (2015-2025) :

- Memperluas pengembangan produk akhir
- Terbentuknya *centre of excellence* industri oleokimia
- Penguasa pasar internasional
- Pemantapan industri berwawasan lingkungan
- Terintergrasinya industri turunan kelapa sawit di Kalbar, Kalteng dan Papua

#### **Kebijakan Operasional Hilirisasi Industri Kelapa Sawit :**

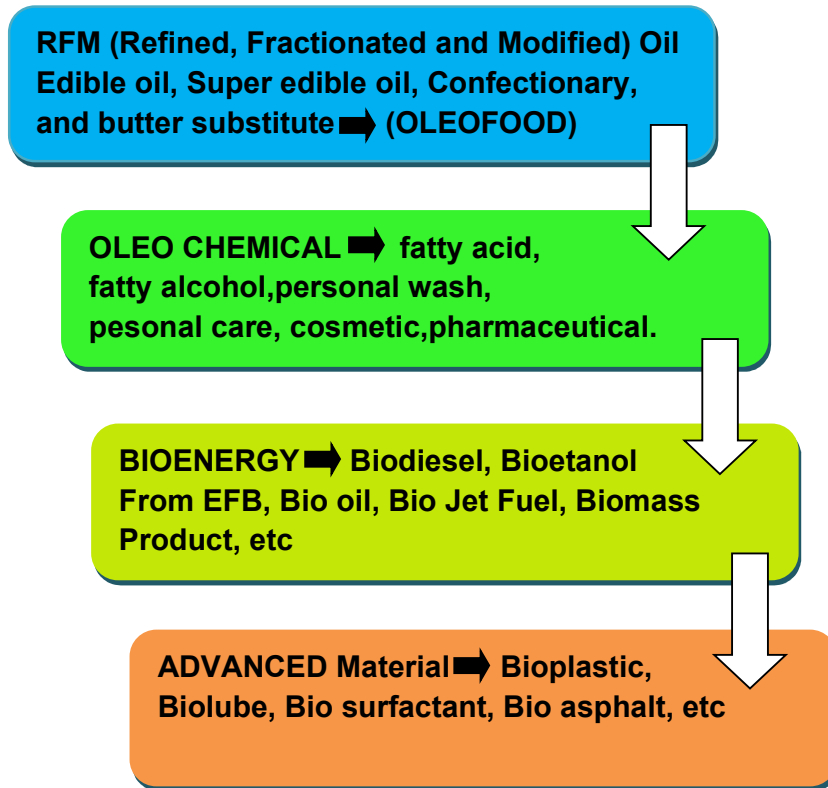
- a. Pemberian Insentif Investasi
  - *Tax Allowance* untuk Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu sesuai (PP Nomor 1 tahun 2007 *jo* PP Nomor 62 Tahun 2008 *jo* PP Nomor 52 Tahun 2011 *jo* PP Nomor 18 Tahun 2015.
  - *Tax Holiday* sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/2011 *jo* PMK Nomor 154 Tahun 2014 *jo* PMK Nomor 159 Tahun 2015

- Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (PMK 76 tahun 2012)
- b.** Restrukturisasi Bea Keluar atas Ekspor CPO dan Produk Turunannya (PMK No. 136 Tahun 2015) dan Kebijakan Pungutan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (PMK No. 133 Tahun 2015)
- Diperlukan untuk :
- Menjamin ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah bagi industri domestik
  - Mengamankan pasokan serta harga minyak goreng sebagai bahan pokok di dalam negeri
  - Mendukung Program Nasional Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

Prinsip restrukturisasi

- Progresif vertikal Tarif BK produk Hulu-*Intermediate* lebih tinggi, berdasarkan Rantai Nilai Industri
  - Progresif Horizontal Tarif BK sejalan dengan harga CPO Internasional, penyeimbang *windfall profit*
  - Pengembalian Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk perbaikan fasilitas infrastruktur perkebunan kelapa sawit, pembangunan industri hilir, infrastruktur kawasan industri khusus sawit dan promosi investasi
- c.** Pengembangan Kawasan Industri (Sei Mangkei, Dumai, Maloy) dan Kalbar, Kalteng, Papua serta Pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Industri Perkelapasawitan
- d.** Promosi Investasi, Advokasi *Non-Tariff Barrier* dan *Anti Negative Campaign*

**Strategi Pemilihan Produk Hilir yang dikembangkan**



Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 31.1/M-IND/PER/3/2015 dan perubahannya Nomor: 85.1/M-IND/PER/12/2016 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019, maka target pembangunan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel. II.4. Target Indikator Kinerja Utama Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2017 - 2019**

No.	Sasaran Program /Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
1.	Meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan				
1.1	Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh	Unit Usaha	239	261	285
1.2	Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan	Trilyun Rupiah	60,80	67,09	54,12

2.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan					
2.1	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya	Persen	10,4	10,5	10,48	
2.2	Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan	Rp.Juta/org/thn	249,7	263,8	288,1	

**Tabel. II.5. Target Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2017-2019**

No.	Sasaran Program /Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			2017	2018	2019
S1	Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam Perekonomian Nasional.				
S1.1	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan	Persen	2,96	2,65	2,54
S1.2	Kontribusi PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	Persen	1,58	1,60	1,60
S1.3	Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan	Juta Orang	2,76	2,80	2,84

**Tabel. II.6. Target Indikator Pembangunan (RPJM) Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2015 - 2019**

No.	Sasaran Program /Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Hasil Hutan dan Perkebunan (Quickwins: Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri)						
1.1	Berkembangnya industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya	Komoditas	3	3	3	3	3
1.2	Tumbuh dan berkembangnya industri oleokimia dan kemurgi	Komoditas	2	2	2	2	2
2.	Meningkatnya daya saing industri Hasil Hutan dan Perkebunan						
2.1	Tersusunnya standar produk industri hasil hutan dan perkebunan	RSNI/SNI	13	13	15	15	15
2.2	Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di dalam negeri maupun luar negeri	Partisipasi	15	15	15	15	15

## **B. Rencana Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2019**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenperin telah dibangun peta strategi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang mengacu pada pada visi misi Kementerian Perindustrian. Visi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yaitu mewujudkan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang berdaya saing dengan struktur Industri yang kuat berbasis sumber daya alam. Visi ini kemudian dijabarkan dalam misi yaitu meningkatkan populasi industri untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri hasil hutan dan perkebunan; dan meningkatkan daya saing dan produktivitas industri untuk mewujudkan industri hasil hutan dan perkebunan yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah **meningkatkan peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional**. Keberhasilan tujuan ini diukur dengan:

- (1) Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan dengan target 2,54 Persen.
- (2) Kontribusi PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional dengan target 1,60 Persen
- (3) Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan dengan target 2,84 Juta Orang

Selain tujuan seperti tersebut di atas ditetapkan pula sasaran strategis dari tujuan dimaksud. sasaran strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2019 yaitu:

- **Meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan**. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan: (1) Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh dengan target 116 - 127 Unit Usaha dan (2) Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan dengan target 54,1 Trilyun Rupiah.



- **Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan.** Keberhasilan sasaran ini diukur dengan: (1) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya dengan target 10,48 Persen dan (2) Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan dengan target Rp. 288,1 Juta Perorang Tahun.
- **Terlenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan.** Keberhasilan sasaran ini diukur dengan: Infrastruktur kompetensi yang terbentuk dengan target 3 RSKKNI.
- **Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel.** Keberhasilan sasaran ini diukur dengan: Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang Diblokir dengan target 20 Persen.

#### **Indikator Kinerja Utama**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2019, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama tersebut dengan target capaian sebagai berikut.

- (1) Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh sebanyak 116 - 127 Unit Usaha.
- (2) Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan sebesar 54,1 Triliyun Rupiah.
- (3) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional sebesar 10,48 Persen.
- (4) Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan sebesar 288,1 Rupiah Juta Perorang Tahun.

## **Kegiatan**

Untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan untuk Tahun 2019, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan merencanakan kegiatan dengan beberapa komponen kegiatan/output yang menjadi pendukung pencapaian sasaran tersebut yaitu kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, dengan 12 (dua belas) Output sebagai berikut.

- (1) Investment Catalogue Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- (2) Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- (3) Standar Nasional Indonesia Yang Disusun/Direvisi, Diberlakukan dan Diawasi di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
- (4) Perusahaan Berbasis Hasil Hutan Dan Perkebunan Yang Menerapkan Standar Mutu
- (5) Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi)/KKNi Yang Disusun/Direvisi di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
- (6) Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional
- (7) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional
- (8) Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha
- (9) Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar Dan Tarif Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional
- (10) Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon
- (11) Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional
- (12) Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

Tabel. II.7. Rencana Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019

No.	Tujuan / Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Kegiatan	Target	
				Satuan	Anggaran (Rp)
<b>TUJUAN</b>					
1.	Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional	1. Laju pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	a. Penyusunan Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar Dan Tarif Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional	2,54 persen	960.000.000
		2. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	b. Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon	1,6 persen	1.584.500.000
		3. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	c. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas IHHP	2,84 juta orang	1.426.405.000
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>					
1.	Meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan	1. Unit industri hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh*)	a. Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional	116-127 unit usaha	949.000.000
		2. Nilai investasi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan*)	b. Invesment Catalogue Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	54,12 trilyun rupiah	938.000.000
2.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan	1. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional*)	c. Sni Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan d. Perusahaan Berbasis Hasil Hutan Dan Perkebunan Yang Menerapkan Standar Mutu e. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional f. Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional	10,48 persen	1.907.785.000 1.464.000.000 760.554.000 2.200.000.000
		2. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan*)	g. Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	288,1 Rp juta/org /thn	3.350.000.000

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL					
1.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk:	a. Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	3 RSKKNi	1.325.240.000
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI					
1.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	1. Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang diblokir	a. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha	20 persen	1.960.000.000

**Tabel. II.8. Rencana Kinerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

No.	Sasaran Program /Indikator	Kegiatan
1.	Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Hasil Hutan dan Perkebunan (Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri)	
1.1	Berkembangnya industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya	Bantuan mesin peralatan untuk industri furniture kayu dan rotan, dan alat laboratorium industri pulp & kertas dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri hasil hutan dan perkebunan dan menumbuhkan populasi unit usaha baru dan penyerapan tenaga kerja.
1.2	Tumbuh dan berkembangnya industri oleokimia dan kemurgi	Penyusunan rekomendasi iklim usaha industri hilir perkebunan non pangan (Oleokimia dan Kemurgi) dengan tujuan menumbuhkan populasi unit usaha baru dan penyerapan tenaga kerja dibidang industri oleokimia dan kemurgi.
2.	Meningkatnya daya saing industri Hasil Hutan dan Perkebunan	
2.1	Tersusunnya standar produk industri hasil hutan dan perkebunan	Penyusunan 10 draft RSNI industri pulp & kertas, 4 draf RSNI industri furniture. Sedangkan untuk 1 draft RSNI industri hilir perkebunan non pangan (Oleokimia dan Kemurgi) dengan tujuan meningkatkan daya saing produk industri hasil hutan dan perkebunan di dalam negeri maupun luar negeri.

	2.2	Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di dalam negeri maupun luar negeri	Berpartisipasi dalam forum/sidang/promosi/pameran dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar calon investor tertarik menanamkan investasinya di Indonesia.
--	-----	---	--

### C. Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2019

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dan didukung oleh anggaran yang sah dalam DIPA, maka ditetapkan kinerja yang akan dicapai. Penetapan kinerja merupakan kontrak kerja antara pimpinan satuan kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan satuan kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran dan indikator kinerja. Perjanjian kinerja disusun dan ditetapkan pada awal tahun anggaran dan dilakukan evaluasi secara berkala minimal 1 kali dalam setahun. Sasaran dan indikator yang akan dicapai pada rencana kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### 1. Perspektif Tujuan

No.	Tujuan / Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
1	Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional	1. Laju pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	2,54	Persen
		2. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	1,6	Persen
		3. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	2,84	Juta Orang

#### 2. Perspektif Pemangku Kepentingan

Tabel II. 9. IKU Sasaran Strategis Perspektif Pemangku Kepentingan

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
1	Meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan	1. Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh	116 - 127	Unit Usaha

		2. Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan	54,1	Trilyun Rupiah
2	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan	1. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya	10,48	Persen
		2. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan	288,1	Rp.Juta/orang/tahun

### 3. Perspektif Proses Bisnis Internal

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
1.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk	3	SKKNI

### 4. Perspektif Pembelajaran Organisasi

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
1.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	1. Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan yang diblokir	20	Persen

Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan ditetapkan pada bulan Januari 2019 dan dilakukan reviu terhadap perubahan yang terjadi.

## D. Rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019

Berkaitan dengan tupoksi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki 2 (dua) Kegiatan yaitu "Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan" dan "Peningkatan Kompetensi SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan" yang memiliki 12 (dua belas) Output Kegiatan dengan total anggaran **Rp. 18.825.484.000,-** (Delapan belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan yang masih di blokir sebesar **Rp. 848.867.000,-** atau 4,51 persen. Dua belas Output Kegiatan dimaksud yaitu:

**1) Invesment Catalogue Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan;**

Output ini meliputi profil investasi, iklim investasi, dan informasi yang komprehensif terkait investasi, peluang, dan potensi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan dengan anggaran sebesar **Rp. 938.000.000,-**. Dengan kegiatan yang dilakukan adalah:

- Penyusunan profil investasi dan informasi komprehensif tentang industri hasil hutan dan perkebunan.

**2) Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan**

Output ini memiliki 3 (tiga) rekomendasi yang harus diselesaikan, yaitu Rekomendasi Kebijakan Insentif Non-fiskal dengan anggaran sebesar **Rp. 1.426.405.000,-**, dengan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Penyusunan rekomendasi terkait iklim usaha industri furniture dan pengolahan kayu;
- Penyusunan rekomendasi terkait iklim usaha industri pulp & kertas;
- Partisipasi Dalam Kegiatan Forum Kerjasama Internasional Bidang Industri Oleokimia, Kemurgi Dan Minyak Atsiri;
- Partisipasi dalam kegiatan forum kerjasama internasional bidang industri pengolahan selulosa & karet; dan
- Partisipasi Dalam Kegiatan Forum Kerjasama Internasional Bidang Industri Furniture Dan Pengolahan Kayu

**3) Standar Nasional Indonesia Yang Disusun/Direvisi, Diberlakukan dan Diawasi di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan**

Output ini memiliki 15 (lima belas) volume RSNI yang harus disusun rancangannya, yaitu: 10 RSNI produk pulp dan kertas, 4 RSNI produk furniture, dan 1 RSNI hilir perkebunan non pangan.

Kegiatan yang harus diselesaikan ini membutuhkan anggaran sebesar **Rp. 1.907.785.000,-**, dengan kegiatan meliputi:

- Penyusunan RSNI produk pulp dan kertas
- Penyusunan RSNI produk furniture
- Penyusunan RSNI hilir perkebunan non pangan

**4) Perusahaan Berbasis Hasil Hutan Dan Perkebunan Yang Menerapkan Standar Mutu**

Volume output ini adalah 25 (dua puluh lima) perusahaan yang mendapatkan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi dengan anggaran sebesar **Rp. 1.464.000.000,-** , dengan kegiatan:

- Melaksanakan pendampingan terhadap perusahaan di sektor industri hasil hutan dan perkebunan untuk mendapatkan sertifikasi, sehingga memiliki peningkatan value dan kualitas perusahaan maupun produk yang dihasilkan.

**5) Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan**

Volume output yang ingin dicapai adalah 3 (tiga) Rancangan SKKNI, yaitu 1 RSKKNI di bidang industri Furniture dan Pengolahan Kayu, 1 RSKKNI di bidang industri selulosa dan karet, dan 1 RSKKNI di bidang industri hasil perkebunan non pangan, dengan anggaran sebesar **Rp. 1.325.240.000,-**

**6) Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional**

Volume output yang ingin dicapai adalah 1 (satu) dokumen roadmap (hard copy dan soft copy), profil investasi dan CD Interaktif industri intermediate atsiri serta maket pabrik intermediate atsiri; termasuk menyiapkan contoh/*speciment* produk minyak atsiri unggulan yang dapat menjadi bahan promosi investasi. dengan anggaran sebesar **Rp. 949.000.000,-**

**7) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional**

Output Rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Jaminan Pasokan Bahan Baku pada Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang ingin dicapai sebanyak 3 (tiga) Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan jaminan pasokan bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan melalui fora kerjasama internasional, dengan anggaran sebesar **Rp. 760.554.000,-** melalui kegiatan yaitu:



- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Melalui Fora Kerjasama Internasional Industri Furniture Dan Kayu Olahan
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Melalui Fora Kerjasama Internasional Industri Selulosa Dan Karet
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Melalui Fora Kerjasama Internasional Industri Hasil Perkebunan Non Pangan

#### **8) Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha**

Output kegiatan ini adalah 3 (tiga) dokumen terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan direktorat industri hasil hutan dan perkebunan, yaitu 1 (satu) Laporan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, 1 (satu) Laporan Identifikasi Isu Aktual Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, 1 (satu) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja IHHP, 1 (satu) Laporan Penerapan Budaya 5K, dengan anggaran sebesar **Rp. 1.960.000.000,-**. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Identifikasi Isu Aktual Industri Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Penerapan Budaya 5K Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

#### **9) Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar Dan Tarif Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional**

Output ini merupakan 1 (satu) dokumen hasil kajian dan analisis yang berbentuk hard copy dan soft copy. dengan anggaran sebesar **Rp. 960.000.000,-** Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar dan Tarif Dana Perkebunan terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional

**10) Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon**

Volume output yang ingin dicapai adalah 1 (satu) dokumen kajian yang memuat rekomendasi pengadaan Mesin Peralatan untuk mendukung pengujian terhadap industri rayon. Kegiatan ini membutuhkan anggaran sebesar **Rp. 1.584.500.000.-**. Kegiatan yang dilakukan adalah:

- Pengadaan mesin peralatan pengujian serat rayon viscose

**11) Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional**

Volume output yang ingin dicapai adalah 1 (satu) dokumen Konsep Pengembangan Sistem Logistik Kayu Nasional. Kegiatan ini membutuhkan anggaran sebesar **Rp. 2.200.000.000.-**. Kegiatan yang dilakukan adalah:

- Konsep Pengembangan Sistem Logistik Kayu Nasional.

**12) Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan**

Output kegiatan ini adalah 240 (dua ratus empat puluh) orang SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi, wawasan, dan soft skill untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Kegiatan ini membutuhkan anggaran sebesar **Rp. 3.350.000.000.-**. Kegiatan yang dilakukan adalah:

- 320 SDM industri yang mendapatkan peningkatan kompetensi, terdiri dari :
  - 150 SDM industri percetakan yang mendapatkan peningkatan kompetensi, sebanyak 40 SDM industri di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, 30 SDM industri di wilayah Jawa Timur, 40 SDM industri di wilayah Sumatera bagian utara\*, 40 SDM industri di wilayah Jawa Barat\*
  - 100 SDM industri furnitur dan pengolahan kayu yang mendapatkan peningkatan kompetensi, sebanyak 40 SDM industri di wilayah Jawa Tengah, 30 SDM industri di wilayah Jawa Timur dan 30 SDM industri di wilayah Bali
  - 70 SDM industri minyak atsiri yang mendapatkan peningkatan kompetensi di wilayah Jawa Barat

Untuk mencapai 12 (dua belas) Output tersebut anggaran yang dibutuhkan Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan adalah sebesar **Rp. 18.825.484.000,-** (Delapan belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) pada Tahun Anggaran 2019.

Adapun matrik kegiatan/komponen input yang akan dikerjakan Direktorat Industri Hasil Hutan dalam menunjang tercapainya Output yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

**Tabel II.10**  
**Rencana Anggaran Tahun 2019**

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
7	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	18.825.484.000
1833	Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	15.475.484.000
1833.029	Investment Catalogue Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	938.000.000
51	<i>Investment Catalogue Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	938.000.000
1833.031	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	1.426.405.000
55	<i>Penyusunan Rekomendasi Terkait Iklim Usaha Industri Furniture Dan Pengolahan Kayu</i>	246.405.000
56	<i>Penyusunan Rekomendasi Terkait Iklim Usaha Industri Selulosa Dan Karet</i>	780.000.000
57	<i>Penyusunan Rekomendasi Terkait Iklim Usaha Industri Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</i>	400.000.000
1833.032	Sni Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	1.907.785.000
60	<i>Penyusunan Rsnj Selulosa Dan Karet</i>	750.028.000
61	<i>Penyusunan Rsnj Furnitur Dan Pengolahan Kayu</i>	599.024.000
62	<i>Penyusunan Rsnj Hilir Perkebunan Non Pangan</i>	558.733.000
1833.034	Perusahaan Berbasis Hasil Hutan Dan Perkebunan Yang Menerapkan Standar Mutu	1.464.000.000
66	<i>Pendampingan Sertifikasi Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	1.464.000.000
1833.037	Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	1.325.240.000
67	<i>Penyusunan/revisi Rancangan Skkni/kkni Industri Furniture Dan Pengolahan Kayu</i>	477.740.000
68	<i>Penyusunan/revisi Rancangan Skkni/kkni Industri Selulosa Dan Karet</i>	502.600.000
69	<i>Penyusunan/revisi Rancangan Rskkni/kkni Industri Hasil Perkebunan Non Pangan</i>	344.900.000
1833.048	Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional	949.000.000
51	<i>Jumlah Dokumen Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional</i>	949.000.000
1833.053	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional	760.554.000
51	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Melalui Fora Kerjasama Internasional Industri Furniture Dan Kayu Olahan</i>	393.779.000

52	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Melalui Fora Kerjasama Internasional Industri Selulosa Dan Karet</i>	175.775.000
53	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Melalui Fora Kerjasama Internasional Industri Hasil Perkebunan Non Pangan</i>	191.000.000
1833.056	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha	1.960.000.000
1	Dokumen Program, Evaluasi Dan Pelaporan	1.855.000.000
51	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	585.000.000
52	<i>Identifikasi Isu Aktual Industri Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	670.000.000
53	<i>Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	600.000.000
2	Layanan Tata Usaha	105.000.000
51	<i>Penerapan Budaya 5 K Direktorat Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan</i>	105.000.000
1833.057	Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar Dan Tarif Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional	960.000.000
57	<i>Penyusunan Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar Dan Tarif Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional</i>	960.000.000
1833.058	Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon	1.584.500.000
58	<i>Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon</i>	1.584.500.000
1833.059	Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional	2.200.000.000
59	<i>Penyusunan Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan</i>	1.000.000.000
60	<i>Penyusunan Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional</i>	1.200.000.000
4906	Peningkatan Kompetensi Sdm Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	3.350.000.000
4906.039	Pelatihan Sdm Di Sektor Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	3.350.000.000
71	<i>Pelatihan Sdm Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Bidang Teknik Produksi (finishing) Dan Desain</i>	991.360.000
72	<i>Pelatihan Sdm Industri Percetakan, Selulosa Dan Karet Bidang Energi, Lingkungan, Desain</i>	1.590.408.000
73	<i>Pelatihan Sdm Industri Hilir Perkebunan Non-pangan Berbasis Kompetensi</i>	768.232.000
<b>TOTAL</b>		<b>18.825.484.000</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Analisis Capaian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2019**

Secara umum Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian target-target sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2019. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target atas indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran pada awal tahun seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2019.

Penilaian atas pelaksanaan tugas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2019 yang dijelaskan pada BAB II yaitu meningkatkan peran industri dalam perekonomian nasional, ukuran keberhasilan tujuan ini dihitung melalui indikator tujuan yaitu laju pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan, kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional, dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan non-migas dengan capaian tertera dalam tabel berikut.

**Tabel. III.1. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan (IKT) dari Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	2015	2016	2017		2018		2019		Satuan
		R	R	T	R	T	R	T	R	
Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional	Laju pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	3,38	4,43	2,96	5,61	5,5	4,94	2,54	2,07	Persen
	Kontribusi PDB industri hhp terhadap PDB nasional	1,71	1,63	1,58	1,56	1,60	1,18	1,6	1,44	Persen
	Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan non-migas	1,3	1,2	2,76	3,2	2,8	2,8	2,84	2,77	Juta orang

Sasaran strategis Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam Perekonomian Nasional bertujuan untuk melihat kontribusi industri hasil hutan dan perkebunan terhadap pembangunan industri nasional. Pencapaian tujuan ini diukur dengan “laju pertumbuhan PDB industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan”.

Penghitungan PDB ini atas dasar harga berlaku yang dipublikasikan oleh BPS. Target indikator ini pada tahun 2019 adalah 2,54 persen dan terealisasi sebesar 2,77 persen dengan capaian sebesar 81,5 persen. Sedangkan tahun sebelumnya terealisasi sebesar 4,94 persen dari 5,5 persen yang ditargetkan.

Capaian untuk tahun 2019, industri hasil hutan dan perkebunan mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,94 persen dari tiga kategori industri yaitu Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya tumbuh positif 1,56 persen; Industri kertas dan barang dari kertas tumbuh positif 4,8 persen; Industri karet, barang dari karet dan plastik tumbuh positif sebesar 12,34 persen; serta industri furniture tumbuh positif sebesar 1,07 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 dengan pertumbuhan positif masing masing komoditi berturut-turut adalah sebesar 1,63 persen, (1,49) persen, dan 5,47 persen.

“Kontribusi industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional” tahun 2019 adalah 1,38% meningkat sebesar 16,9% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,18%. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan berkontribusi sebesar 15,93 % terhadap industri agro.

Kontribusi PDB Industri pengolahan hasil hutan terhadap PDB nasional yang ditargetkan 1,6 persen pada tahun 2019, terealisasi sebesar 1,44 persen dengan capaian 90 persen. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh:

Kontribusi PDB Industri pengolahan hasil hutan terhadap PDB nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, terdapat sedikit pengaruh negative, maka akan sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Hilirisasi industri belum berjalan efektif, banyak faktor yang mempengaruhi program hilirisasi, yaitu; regulasi terkait bahan baku, tata niaga terkait bahan baku, regulasi mengenai pengelolaan lahan, dan hal lain yang terkait.

Indonesia merupakan negara dengan bahan baku industri yang melimpah, namun belum dapat memanfaatkan dengan baik, sehingga bahan baku tersebut memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan memiliki harga produk yang lebih stabil pada perdagangan internasional. Keterbatasan hilirisasi tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah regulasi dari instansi-instansi terkait, bukan hanya di Kementerian Perindustrian.

Hal tersebut mempengaruhi kinerja industri pengolahan, khususnya sektor hasil hutan dan perkebunan, memiliki kontribusi PDB sebesar 1,44 persen dari yang ditargetkan sebesar 1,60 persen begitu juga terhadap penyerapan tenaga kerja, produktifitas yang pertumbuhannya tidak tinggi, berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang belum optimal, meskipun target telah tercapai. Untuk jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Selain 2 (dua) indikator tersebut di atas, sasaran strategis Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam Perekonomian Nasional dikukur pula dengan “penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan”. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan sampai dengan saat ini. Indikator kinerja ini diukur dengan melakukan penghitungan realisasi berdasarkan data BPS dan SPPISE-BKPM, sampai dengan triwulan III tahun 2019. Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan tahun 2019 sebanyak 2,77 juta tenaga kerja dari yang

ditargetkan sebesar 2,84 juta tenaga kerja, sedangkan Tahun 2018 sebanyak 2,87 juta tenaga kerja, dengan capaian sebesar 97,52 persen. Data ini berdasarkan data dari Industri Besar Sedang dan Industri Menengah Kecil yang telah diolah oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian.

Dari penjelasan di atas tujuan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam “Meningkatnya Peran Industri Hasil Hutan dan Perkebunan” dalam Perekonomian Nasional dapat dikatakan tercapai sesuai target.

**TABEL III.2. PERTUMBUHAN INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2015 - 2019**

(dalam%)

NO	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
1	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-1,63	1,80	1,63	1,56	-1,30
2	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-0,16	2,16	-1,49	4,8	6,94
3	Industri Furnitur	5,17	0,47	5,47	1,07	6,93
<b>Jumlah Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</b>		<b>3,38</b>	<b>4,43</b>	<b>5,61</b>	<b>7,43</b>	<b>2,07</b>
Industri Non Migas		5,05	4,42	5,49	5,01	4,68
Produk Domestik Bruto (PDB)		4,88	5,02	5,06	5,17	5,02

Sumber: BPS diolah Dit.IHHP  
Catatan: \*) Angka Sementara

**TABEL III.3. KONTRIBUSI INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN TERHADAP PDB NASIONAL TAHUN 2015 - 2019**

(dalam%)

NO	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
1	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,68	0,65	0,60	3,25	0,54
2	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,76	0,72	0,71	3,94	0,73
3	Industri Furnitur	0,27	0,26	0,25	1,36	0,24
<b>Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</b>		<b>1,71</b>	<b>1,63</b>	<b>1,56</b>	<b>2,85</b>	<b>1,38</b>

Sumber: BPS diolah Dit.IHHP  
Catatan: \*) Angka Sementara

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tahun 2019 selain melalui keberhasilan tujuan seperti tersebut di atas, diukur pula keberhasilan dari sasaran-sasaran strategis yang tercantum dalam



renstra dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan, seperti berikut.

### **Sasaran Strategis Perspektif Pemangku Kepentingan**

Sasaran strategis perspektif *stakeholders* mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, meliputi:

#### **1. Meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan**

Dalam rangka untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai Indonesia sebesar 5% pada 2019, pemerintah membangun bahan baku di dalam negeri dengan tujuan mengatasi hambatan pasokan bahan baku dan mengurangi bahan baku impor. Sasaran strategis meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan merupakan salah satu parameter untuk mengukur perkembangan kinerja industri dimaksud. Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- (1) Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh dengan target 116 - 127 Unit Usaha.
- (2) Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan dengan target 54,12 Trilyun Rupiah.

Berdasarkan data dari BKPM/ LKPM dan diolah oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian yang merupakan data penambahan jumlah IUI yang terbit sepanjang 2019 terdapat 710 proyek investasi. Sedangkan pada tahun 2018 total jumlah unit usaha industri hasil hutan dan perkebunan sebanyak 961 unit usaha yang merupakan data listing sensus ekonomi. Sehingga pada tahun 2019 total jumlah unit usaha industri hasil hutan dan perkebunan sebanyak 8.518 unit usaha. Capaian indikator “Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh” ini sebesar 9,09 persen. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 356 ijin investasi.

Berdasarkan data dari BKPM sampai dengan bulan september 2019 realisasi investasi sebesar 16,45 Trilyun atau setara 30,4 persen dari yang ditargetkan. Jumlah ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 18,74 Trilyun Rupiah.

Pada tahun 2017 nilai investasi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan sangat tinggi dikarenakan ada investasi industri pulp dan kertas, senilai 40 Trilyun Rupiah, dan setelah itu belum ada investasi dengan nilai sebesar itu.

Tahun sebelumnya, sasaran strategis “meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan” tersebut diukur dengan “berkembangnya industri hasil hutan dan perkebunan dan tumbuh dan berkembangnya industri olekimia dan kemurgi”, yang tercantum pada matrik RPJM 2015 – 2019. Berkembangnya industri hasil hutan dan perkebunan untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha antara lain melalui pemberian bantuan mesin peralatan. Sedangkan tumbuh dan berkembangnya industri olekimia dan kemurgi bertujuan untuk mendukung pelaku usaha antara lain melalui pemberian rekomendasi iklim usaha bidang industri hilir perkebunan non pangan (olekimia dan kemurgi).

**Tabel III. 4. Realisasi IKU dari Sasaran Strategis Meningkatnya Populasi dan Persebaran Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan**

Sasaran Strategis	IKU	2015			2016			2017			2018	2019			Satuan
		T	R	C	T	R	C (%)	T	R	C (%)		T	R	C (%)	
Meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan	Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh	Belum digunakan sebagai indikator						239	356	148,95	223	116-127	710	559	Unit Usaha
	Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan	Belum digunakan sebagai indikator			39,7	42	105	60,80	65,6	107	67,09	54,1	16,45	30,4	Trilyun Rupiah

## 2. Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan

Dalam rangka menghadapi tantangan persaingan pasar internasional maka kebijakan pemerintah mengarah pada peningkatan daya saing industri dengan tujuan agar produk Indonesia khususnya produk hasil hutan dan perkebunan mampu bersaing dengan produk negara lain. Sasaran strategis ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- i. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya dengan target 10,48 Persen.
- ii. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan dengan target Rp. 288,1 Juta/Orang/Tahun.

Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional tahun 2019 adalah sebesar US\$ 26,96 milyar, sedangkan ekspor nasional US\$153,11 milyar. Kontribusi ekspor komoditi industri hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional tahun 2019 yang ditargetkan 10,48 persen, realisasi yang dicapai sebesar 17,61 persen. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2018 sebesar 10,2 persen.

Peningkatan kinerja ekspor dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, salah satu faktor adalah ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, beberapa komoditi dari Indonesia dapat menutupi kekosongan permintaan pasar yang tidak dipenuhi oleh Tiongkok. Beberapa dinamika kondisi industri di sektor industri hasil hutan dan perkebunan, yaitu:

1. Kinerja ekspor produk hasil industri furnitur dan kerajinan Indonesia cenderung stagnan selama beberapa tahun terakhir lantaran masih banyak pelaku usaha yang enggan menerima pesanan dari luar negeri dalam jumlah besar, hal tersebut merupakan eksekusi dari ketidakpastian bahan baku yang hingga kini masih menjadi momok bagi industri furniture dan kerajinan di Tanah Air.
2. permasalahan lain yang ikut membuat kinerja ekspor produk industri furnitur dan kerajinan Tanah Air adalah masih rendahnya kemampuan sebagian besar pelaku usaha untuk menciptakan produk-produk dengan desain atau inovasi yang menarik. Kenyataannya, produk-produk tersebut memiliki nilai tambah yang berkali-kali lipat dan tentunya membuat pelaku usaha memperoleh keuntungan lebih besar dan mendorong kinerja ekspor.
3. Pemahaman pelaku usaha terhadap penerapan SVLK hanya diasumsikan sebagai tambahan biaya produksi saja, bukan sebagai salah satu daya saing dari sisi legalitas kayu sebagai bahan baku, sehingga dapat membuka pangsa pasar ekspor lebih luas.

4. Meningkatnya produktivitas industri furniture dari negara-negara pesaing memiliki kontribusi pada tekanan kinerja ekspor produk kehutanan Indonesia, salah satu negara yang memiliki peningkatan kinerja ekspor adalah Vietnam.
5. Aksesibilitas modal ke sektor perbankan juga belum memberikan iklim usaha yang kompetitif, khususnya suku bunga kredit perbankan di Indonesia masih relatif lebih tinggi dibanding dengan negara-negara eksportir produk kehutanan.
6. Amerika Serikat melalui Departemen Perdagangannya memutuskan mengenakan bea masuk imbalan (countervailing duty) biodiesel Indonesia cukup tinggi: 34,45- 64,73%. Indonesia dituduh memberikan subsidi biodiesel yang diekspor, sehingga bisa merebut sebagian pasar biodiesel di sana.
7. Isu lingkungan yang diinisiasi oleh Uni Eropa memiliki kontribusi signifikan terhadap penurunan yang sangat tajam terhadap ekspor biodiesel/biofuel dari Indonesia ke Uni Eropa, setelah Indonesia memenangkan sengketa biodiesel di WTO, selanjutnya Uni Eropa merevisi Renewable Energy Directive (RED) dan sepakat untuk menghentikan penggunaan biofuel dari tanaman makanan pada tahun 2030 dipercepat pada tahun 2021.

Rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan” adalah dengan cara terus menerus melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis dimaksud, adapun Output kegiatannya yang ingin dicapai antara lain:

- Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional
- Investment Catalogue Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
- Sni Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
- Perusahaan Berbasis Hasil Hutan Dan Perkebunan Yang Menerapkan Standar Mutu
- Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional

- Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional

Berdasarkan data dari BKPM dan diolah oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian “Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan” pada tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 288,1 juta rupiah perorang pertahun, realisasi yang dicapai sebesar 319,57 juta rupiah perorang pertahun

Tahun sebelumnya sasaran “Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan” diukur dengan jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sektor industri hasil hutan dan perkebunan. Tersusunnya 15 RSNI dari 15 RSNI yang ditargetkan, sehingga sasaran strategis ini dapat dikatakan berhasil sesuai target. RSNI yang telah disusun tersebut merupakan rancangan yang segera akan di tetapkan menjadi SNI. Dokumen SNI digunakan sebagai acuan dalam memproduksi produk industri hasil hutan dan perkebunan. Produk industri hasil hutan dan perkebunan yang memenuhi standar mampu bersaing di pasar internasional.

**Tabel III. 5. Realisasi IKU dari Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Dan Produktivitas Sektor Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan**

Sasaran Strategis	IKU	2015			2016			2017			2018	2019			Satuan
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)		T	R	C (%)	
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya	5	4.1	82	5.7	8.2	144	10.4	8.89	85.48	10,5	10,48	17,61	168	Persen
	Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan	0.5	0.9	18	Belum digunakan sebagai indikator			249,7	372,62	149,22	263,8	288,1	319,57	110	Rp. Juta per orang per tahun

### **Sasaran Strategis Perspektif Bisnis Internal**

Sasaran strategis perspektif Bisnis Internal mempunyai 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, meliputi:

**1. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan**

Sasaran strategis ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan berkelanjutan maka perlu dilakukan upaya untuk mewujudkannya, antara lain menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) dan menerapkannya pada industri hasil hutan dan perkebunan. Sasaran strategis tersebut diukur dengan infrastruktur kompetensi yang terbentuk. Sasaran strategis dan indikator tersebut tidak digunakan pada tahun sebelumnya, namun kegiatan penyusunan RSKKN sudah ada dan telah dilaksanakan setidaknya sejak sepuluh tahun yang lalu. Tahun 2019, RSKKN yang sudah disusun adalah: RSKKN industri selulosa dengan 1 judul unit kompetensi industri kertas; RSKKN industri furniture dengan 1 judul unit kompetensi industri furniture; RSKKN industri hilir perkebunan non pangan dengan 1 judul unit kompetensi dalam SKKN industri atsiri dan turunannya.

**Tabel III. 6. Realisasi IKSS dari Sasaran Strategis Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan**

Sasaran Strategis	IKSS	2015			2016			2017			2018	2019			Satuan
		T	R	C	T	R	C (%)	T	R	C (%)		T	R	C (%)	
Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Infrastruktur kompetensi yang terbentuk	Belum digunakan sebagai indikator						2	2	100	3	3	3	100	RSKKN

**Sasaran Strategis Perspektif Pembelajaran Organisasi**

Sasaran strategis perspektif *stakeholders* mempunyai 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, meliputi:

**1. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel**

Sasaran strategis ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan industri maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencapainya, antara lain menyusun program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan. Bila perencanaan kegiatan dilakukan dengan optimal maka pemblokiran anggaran dapat berkurang. Pemblokiran anggaran menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Sasaran strategis terlaksananya perencanaan/program penganggaran dan pengendalian yang berkualitas diukur berdasarkan persentase anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang dibintangi dalam catatan halaman IV DIPA karena kesalahan dalam perencanaan, dengan target kurang dari 20% anggaran yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA. Realisasi IKSS tersebut sebesar 4,51%. Pencapaian target ini dilakukan melalui pembahasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian.

**Tabel III.7. Realisasi IKSS dari Sasaran Strategis Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas Dan Akuntabel**

Sasaran Strategis	IKSS	2015			2016			2017			2018	2019			Satuan
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)		T	R	C (%)	
Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang diblokir	Tidak digunakan sebagai indikator						20	18,2	102	20	20	4,51	443	Persen

Secara umum pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III. 8. Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Berdasarkan Perspektif**

No.	Perspektif	Capaian (%)			
		2016	2017	2018	2019
1.	Perspektif <i>Stakeholders</i>	124,5	122,66	123,4	217
2.	Perspektif Bisnis Internal	-	100	100	100
3.	Perspektif Pembelajaran Organisasi	-	102	204	443
Rata-rata		124,5	108,22	142,4	253,3

**Tabel III. 9. Realisasi Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan	Realisasi
<b>TUJUAN</b>					
1	Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional	1. Laju pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	2,54	Persen	2,07
		2. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	1,6	Persen	1,44
		3. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	2,84	Juta Orang	2,77
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>					
1.	Meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan	1. Unit industri hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh*)	116-127	Unit	710
		2. Nilai investasi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan*)	54,12	Rp. Triliun	16,54
2.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan	1. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional*)	10,48	Persen	17,61
		2. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan*)	288,1	Rp. Juta /Orang/ Tahun	319,57
<b>PERSPEKTIF PROSES INTERNAL</b>					
1.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian	1. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk:			



	yang berdaya saing dan berkelanjutan	a. SKKNI yang ditetapkan	3	SKKNI	3
<b>PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI</b>					
1.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	1. Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang diblokir	20	Persen	4,51

## B. Analisis Capaian Kinerja Rencana Strategis Direktorat IHHP Tahun 2015 – 2019 Perubahan

Berdasarkan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, secara umum capaian kinerja terhadap dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel III.10. Realisasi Indikator Kinerja Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2015 – 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018	2019			Satuan
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	T	R	C	
<b>Perspektif Stakeholder</b>															
Meningkatnya populasi dan persebaran industry hasil hutan dan perkebunan	Unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh	Belum digunakan sebagai indikator						239	356	148,95	261	116-127	710	559	Unit Usaha
	Nilai investasi di sektor industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan	Belum digunakan sebagai indikator			39,7	42	105	60,80	65,6	107	67,09	54,1	16,45	30,4	Trilyun Rupiah
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industry hasil hutan dan perkebunan	Kontribusi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional	5	4.1	82	5.7	8.2	144	10.4	8.89	85.48	10,5	10,48	17,61	168	Persen
	Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan	0.5	0.9	18	Belum digunakan sebagai indikator			249,7	372,62	149,22	263,8	288,1	319,57	110,9	Rp. Juta per orang per tahun
<b>Perspektif Proses Internal</b>															
Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Infrastruktur kompetensi yang terbentuk	Belum digunakan sebagai indikator						2	2	100	3	3	3	100	RSKKNi
<b>Perspektif Pembelajaran Organisasi</b>															
Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang diblokir	Belum digunakan sebagai indikator						20	18,2	102	20	20	4,51	443	Persen

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2015 – 2019, target jangka menengah untuk setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh dengan target 116 - 127 unit usaha. Realisasi untuk indikator ini adalah tumbuhnya 710 unit usaha industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 2019 dan diharapkan terus tumbuh.
2. Nilai investasi di sektor industri pengolahan pengolahan hasil hutan dan perkebunan dengan target 54,1 Triliun Rupiah, tahun 2019 terealisasi sebanyak 16,45 Triliun Rupiah. Sehingga capaian diharapkan dapat dipertahankan setiap tahunnya.
3. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional dengan target 10,48 persen tahun 2019 terealisasi sebesar 17,61 persen, yaitu telah melampaui target yang ditetapkan.
4. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan dengan target 288,1 Juta Rupiah/Orang/Tahun terealisasi sebesar 319,57 Juta Rupiah/Orang/Tahun. Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
5. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk dengan target 3 SKKNI, tercapai sesuai target tahun 2019.
6. Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang diblokir dengan target 20 persen. Sampai akhir tahun 2019 realisasi sebesar 4,51 persen sehingga perlu dipertahankan.

Secara umum pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis 2015-2019 mengalami dinamika yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III. 11. Capaian Indikator Kinerja Rencana Strategis Berdasarkan Perspektif**

No.	Perspektif	Capaian (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perspektif <i>Stakeholders</i>	50	124,5	122,66	123,4	217
2.	Perspektif Bisnis Internal	-	-	100	100	100
3.	Perspektif Pembelajaran Organisasi	-	-	102	204	443
Rata-rata		50	124,5	108,22	142,4	253,3

**Tabel. III. 12. Realisasi Indikator Pembangunan (RPJM) Quickwins Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2015 - 2019**

No.	Sasaran Program /Indikator	2015			2016			2017			2018	2019	Satuan
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	T	
1.	Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Hasil Hutan dan Perkebunan (Quickwins: Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri)												
1.1	Berkembangnya industri Hasil Hutan dan Perkebunan Lainnya	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	Komoditas
1.2	Tumbuh dan berkembangnya industri oleokimia dan kemurgi	2	2	100	2	2	100	2	2	100	3	3	Komoditas
2.	Meningkatnya daya saing industri Hasil Hutan dan Perkebunan												
2.1	Tersusunnya standar produk industri hasil hutan dan perkebunan	13	13	100	13	13	100	15	15	100	15	15	RSNI
2.2	Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di dalam negeri maupun luar negeri	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	Partisipasi

Sasaran strategis “meningkatnya populasi industri sedang dan besar hasil hutan dan perkebunan (Quickwins: Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri)” ini diwujudkan dengan memfasilitasi dalam bentuk bantuan mesin peralatan kepada pelaku usaha di daerah terkait 3 komoditas antara lain industri furniture kayu, rotan, dan kertas. Sasaran strategis tersebut diukur dengan “berkembangnya industri hasil hutan dan perkebunan”. Dengan telah diberikannya bantuan mesin peralatan mencakup 3 bidang industri dimaksud, maka sasaran strategis ini telah tercapai sesuai target.

Sedangkan indikator “tumbuh dan berkembangnya industri oleokimia dan kemurgi” bertujuan untuk mendukung pelaku usaha antara lain melalui pemberian rekomendasi iklim usaha bidang industri hilir perkebunan non pangan (oleokimia dan kemurgi). Dengan telah dikeluarkannya rekomendasi mencakup 2 bidang industri dimaksud, maka sasaran strategis ini telah tercapai sesuai target.

Sasaran strategis “meningkatnya daya saing industri Hasil Hutan dan Perkebunan” diukur dengan “tersusunnya rancangan standar produk industri hasil hutan dan perkebunan” yang diwujudkan dengan penyusunan/

penyempurnaan RSNI dibidang industri pulp & kertas (10 judul), industri furniture (4), dan industri hilir perkebunan non pangan (Oleokimia dan Kemurgi) (1 judul). Sedangkan “Partisipasi Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam forum/sidang/promosi/ pameran dalam negeri maupun luar negeri” diukur dengan keikutsertaan pemerintah dalam hal ini delegasi dari Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dalam forum/sidang/promosi/pameran di dalam maupun luar negeri.

Dengan telah tersusunnya 15 RSNI produk industri hasil hutan dan perkebunan dimaksud, Dan dengan ikut berpartisipasi Dit. IHHP dalam forum/sidang/promosi/ pameran dalam negeri maupun luar negeri, maka telah tercapai sesuai target.

Secara umum pencapaian sasaran strategis berdasarkan pembangunan jangka menengah quickwins mengalami kesamaan dari tahun ke tahun Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.13. Capaian Indikator Pembangunan (RPJM) Berdasarkan Sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Capaian (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar Hasil Hutan dan Perkebunan (Quickwins: Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri)	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya daya saing industri Hasil Hutan dan Perkebunan	100	100	100	100	100
Rata-rata		100	100	100	100	100

### **C. Analisis Capaian Kinerja Program Prioritas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2019**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mengemban tugas untuk melaksanakan program prioritas yang diamanahkan dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang diturunkan melalui Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015 - 2019. Adapun Program Prioritas tahun 2019 tertera pada tabel berikut.

**Tabel III. 14. Realisasi Target Program Prioritas  
Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2019**

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Sasaran kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</b>	Penyusunan Invesment Catalogue Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Jumlah katalog investasi	1 katalog	1	100
	Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional	Jumlah Roadmap	1 Roadmap	1	100
	Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon	Rekomendasi pengembangan proses Proses Produksi	1 Rekomendasi	1	100
	Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional	Jumlah konsep Rantai Alur Bahan Baku dan konsep desain	2 Konsep	2	100
	Tersusunnya rancangan SKKNI SDM industri hasil hutan dan perkebunan yaitu SKKNI yang disusun adalah SKKNI Industri Furniture (20 unit kompetensi) dan SKKNI Industri Hilir Non Pangan (1 peta jembatan kompetensi industri atsiri)	Jumlah SKKNI yang tersusun	3 RSKKNI	3	100
	Tersusunnya Rancangan dan/atau revisi Standar Nasional Indonesia produk industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hasil hutan dan perkebunan, yaitu RSNI Industri Pulp & Kertas (10 Judul), RSNI Industri Furniture (4 Judul), dan RSNI IHPNP (1 Judul)	Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia	15 RSNI	15	100

Berdasarkan Program Prioritas Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2019, berikut aktivitas yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja program prioritas sebagai berikut.

## 1. Penyusunan Investment Catalogue

Menyusun data/informasi/regulasi pokok terkait investment opportunity di Industri hilir kelapa sawit di dalam negeri, yaitu:

1. Mengetahui potensi bahan baku pada industri hilir pengolahan Kelapa Sawit
2. Mengetahui potensi ketersediaan dan kebutuhan energi pada industri pengolahan Kelapa Sawit
3. Mengetahui potensi tenaga kerja pada industri hilir pengolahan Kelapa Sawit
4. Mengetahui potensi infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, jalan, kawasan industri dll.
5. Mengetahui insentif fiskal dan non-fiskal yang dapat mendukung pengembangan investasi pada industri hilir pengolahan Kelapa Sawit

Penyusunan Investment Catalogue dilaksanakan dengan mekanisme kontraktual pihak ketiga, dan telah diselesaikan pada bulan Desember 2019.

## 2. Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional

Pelaksanaan kegiatan ini adalah Menyusun analisis investasi sebagai bahan profil investasi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan bagi calon investor sekaligus material promosi investasi.

Analisis Data dan Pengembangan model dasar menjadi model implementatif (lengkap dengan target sasaran secara kualitatif – kuantitatif) pengembangan sektor industri atsiri intermediate – hilir, yang berisi pre-requisite dari pihak pelaku usaha industri dan dukungan kebijakan pemerintah; yang tidak terbatas pada lingkup teknologi produksi, tata niaga dan kebijakan ekspor impor, fasilitas insentif investasi, kemitraan dengan petani rakyat, dan kebijakan lainnya yang sejalan dengan prinsip pengembangan industri 4.0

## 3. Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon

Rayon adalah bahan baku industri Tekstil dan Produk Tekstil yang saat ini masih diimpor rata-rata 500 ribu - 600 ribu ton/tahun. Oleh karena itu perlu didukung pengembangan industri rayon berbasis bahan baku alternatif yang

dapat diperbaharui seperti kayu dari Hutan Tanaman Industri yang dikelola secara lestari. Sehingga produk rayon Indonesia dapat menjadi substitusi impor rayon untuk mendukung jaminan pasokan bahan baku industri tekstil dan produk tekstil. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mekanisme kontraktual pihak ketiga, dan telah diselesaikan pada bulan Desember 2019

4. Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional

Kegiatan ini adalah menyusun konsep pengembangan sistem logistik kayu nasional yang terintegrasi dari industri hulu untuk penyediaan bahan baku industri furnitur dan pengolahan kayu, dan dilaksanakan dengan mekanisme kontraktual pihak ketiga, dan telah diselesaikan pada bulan Desember 2019

5. Tersusunnya rancangan SKKNI SDM industri hasil hutan dan perkebunan yaitu SKKNI yang disusun adalah 1 (satu) RSKKNI Industri Kertas; 1 (satu) RSKKNI Industri Furniture dan 1 (satu) RSKKNI Industri Hilir Non Pangan dengan target. Sampai akhir tahun 2019 capaian untuk sasaran ini sebesar 100 persen, capaian dari sasaran ini antara lain:

- a. Tersusunnya RSKKNI Industri Kertas
- b. Tersusunnya RSKKNI Industri Furniture
- c. Tersusunnya RSKKNI Industri Hasil Perkebunan Non Pangan/Minyak Atsiri

6. Tersusunnya Rancangan dan/atau revisi Standar Nasional Indonesia produk industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hasil hutan dan perkebunan, yaitu RSNi Industri Pulp & Kertas (10 Judul), RSNi Industri Furniture (4 Judul), dan RSNi Industri Hilir Non Pangan (1 Judul), dengan target 15 RSNi. Sampai akhir tahun 2019. Capaian dari sasaran ini antara lain:

- a. Telah tersusun 10 Judul RSNi industri pulp kertas yaitu : (1) karton dupleks, (2) cara uji daya tembus udara (3) cara uji kekakuan kertas dan karton, (4) kertas pembentuk rokok, (5) cara uji soda dan sulfat pada lindi putih dan lindi hijau, (6) karton salut, (7) penggilingan di laboratorium untuk pulp, (8) cara uji ketahanan minyak kertas dan karton, (9) cara uji kekuatan anata ikatan karton, (10) kertas tahan minyak/lemak

- b. Telah tersusun 4 judul RSNi industri furniture yaitu: (1) Furniture – Bangku (2) Furniture – Kursi belajar untuk sekolah (3) Furniture – Meja belajar untuk sekolah (4) Furniture – Meja dari kayu.
- c. Telah tersusun 1 judul RSNi industri hasil perkebunan non pangan, yaitu: (1) Minyak Nabati Untuk Produksi Biohidrokarbon.
- Sehingga total RSNi yang dapat tersusun sejumlah 15 RSNi.

Secara umum pencapaian program/kegiatan prioritas tahun 2019 adalah sebesar 100 persen.

#### D. Akuntabilitas Keuangan Direktorat IHHP Tahun 2019

Pada tahun anggaran 2019 ini Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 18.825.484.000,-** (Delapan belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan yang masih di blokir sebesar **Rp. 848.867.000,-** atau 4,51 persen. Dana yang terserap pada Tahun Anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar **Rp 17.491.980.269,-** atau sebesar **92,92** persen.

**Tabel. III. 15. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun 2019**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Kegiatan	2019		
				T	R	C
1.	Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional	1. Laju pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	a. Penyusunan Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar Dan Tarif Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional	960.000.000	959.011.250	99,90
		2. Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	b. Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon	1.584.500.000	1.557.365.000	98,29
		3. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	c. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas IHHP	1.426.405.000	1.357.036.760	95,14
1.	Meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan	1. Unit industri hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh*)	a. Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional	949.000.000	948.408.180	99,94



		2. Nilai investasi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan*)	b. Invesment Catalogue Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	938.000.000	937.460.700	99,94
2.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan	1. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional*)	c. Sni Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan d. Perusahaan Berbasis Hasil Hutan Dan Perkebunan Yang Menerapkan Standar Mutu e. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional f. Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional	1.907.785.000 1.464.000.000 760.554.000 2.200.000.000	1.847.969.744 1.440.703.210 733.260.444 2.080.885.901	96,86 98,41 96,41 94,59
		2. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan*)	g. Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	3.350.000.000	2.460.263.930	73,44
1.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk:	a. Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	1.325.240.000	1.260.988.155	95,15
1.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	1. Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang diblokir	a. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha	1.960.000.000	1.908.626.996	97,38

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang dilihat dari sisi perspektif tujuan dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran Strategis (IKSS), 2 (dua) sasaran strategis yang dilihat dari perspektif pemangku kepentingan dengan 4 (empat) Indikator Sasaran Strategis (IKSS), 1 (satu) sasaran strategis dari perspektif proses internal dengan 1 (satu) Indikator Sasaran Strategis, dan 1 (satu) sasaran dari perspektif pembelajaran organisasi dengan 1 (satu) Indikator Sasaran Strategis, dengan IKU dan targetnya masing – masing. Dan sasaran beserta indikatornya telah terjabarkan dalam kontrak kerja tahunan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Perjanjian Kinerja).
2. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terus berkoordinasi dengan instansi terkait diantaranya Kementerian PUPR, Puslit Karet, BSN, BPPI, dinas-dinas terkait di daerah, serta dunia usaha dalam rangka menjalankan program prioritas nasional terutama mengenai pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan di tahun 2019 diantaranya Penyusunan Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional, Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon yang bekerja sama dengan Balai Besar Pulp Kertas, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dibidang industri hasil hutan dan perkebunan, dan penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) dibidang industri hasil hutan dan perkebunan.
3. Berdasarkan data dari BKPM dan diolah oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian yang merupakan data penambahan jumlah IUI yang terbit sepanjang 2019 terdapat 710 unit usaha baru di sektor industri hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2018 total jumlah unit usaha industri hasil hutan dan perkebunan sebanyak 961 unit usaha yang merupakan data listing sensus

ekonomi. Sehingga pada tahun 2019 total jumlah unit usaha industri hasil hutan dan perkebunan sebanyak 8.518 unit usaha. Capaian indikator “Jumlah unit industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh” ini sebesar 9,09 persen. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 356 ijin investasi.

4. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nilai investasi pada Tahun 2019 tercatat sebesar 16,45 triliun rupiah, atau sebesar 30,4 persen dari yang ditargetkan sebesar 54,12 triliun rupiah. Investasi di sektor industri hasil hutan ini terlihat menurun sejak tahun 2016 dan 2017 sampai 2018, hal ini dikarenakan tidak ada investasi skala besar seperti pada tiga tahun sebelumnya tersebut, yaitu investasi sektor pulp dan kertas sebesar 40 triliun rupiah ditambah investasi sektor IHHP yang lain dengan total investasi sebesar 65,61 Triliyun Rupiah.
5. Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional tahun 2019 adalah sebesar US\$ 26,96 milyar, sedangkan ekspor nasional US\$153,11 milyar. Kontribusi ekspor komoditi industri hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional tahun 2019 yang ditargetkan 10,48 persen, realisasi yang dicapai sebesar 17,61 persen. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2018 sebesar 10,2 persen.
6. Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan yang signifikan mengikuti peningkatan produksi dan ekspor sektor pengolahan, yaitu sebesar Rp 319,57 juta per orang per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditargetkan sebesar Rp 288,1 juta per orang per tahun.
7. Secara umum capaian kinerja Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada tahun 2019, capaian dari Perjanjian Kinerja adalah sebesar 253,3% dan capaian Renstra 2015-2019 adalah sebesar 186,24%.
8. Pada Pada Tahun 2019, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp 18.825.484.000,-**. Anggaran ini alokasikan untuk membiayai 2 (dua) program/kegiatan, yaitu Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dan Peningkatan Kompetensi SDM Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan.

9. Capaian keuangan sebesar 92,92 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen sehingga berdasarkan sektor keuangan maka kinerja direktorat adalah 92,92 persen.
10. Analisis capaian indikator kinerja dapat dihitung bahwa realisasi fisik mencapai 71,80 persen dari yang ditargetkan sebesar 100 persen. Sehingga berdasarkan kinerja fisik, maka kinerja direktorat adalah 71,80 persen.

## **B. PERMASALAHAN DAN KENDALA**

Dari hasil evaluasi kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2019, pelaksanaan kegiatan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan tidak terlepas dari kendala dan hambatan, antara lain yaitu:

1. Proses Pelaksanaan revisi anggaran dengan menambahkan jumlah output pada kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, namun setelah dilakukan revisi anggaran dan penambahan output, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan justru melakukan blokir anggaran, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan, yang berdampak pada prosentase realisasi keuangan dan realisasi fisik tidak optimum.
2. Beberapa indikator sasaran tidak dapat tercapai yang disebabkan beberapa faktor makro yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara umum dan kinerja industri secara khusus. Perdagangan internasional, kondisi geopolitik regional maupun global, fluktuasi harga minyak dunia, isu lingkungan, merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja industri yang berimbas pada produktivitas, kinerja ekspor, dan kontribusi terhadap PDB.
3. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pada periode Renstra 2015 – 2019 yang merupakan tahun yang menentukan keberhasilan capaian kinerja industri pada periode Renstra tersebut, beberapa momentum politik turut berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja industri, hal tersebut dikarenakan pelaku usaha maupun calon investor bersikap menunggu situasi dan kondisi politik yang akan menentukan arah kebijakan ekonomi secara umum serta kebijakan terkait industri.

### **C. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT**

1. Melakukan sinkronisasi dan penyelarasan program kegiatan dengan Renstra periode yang baru (2020 – 2024).
2. Membuat SOP mengenai administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan dimana maksimal 7 hari kerja setelah kegiatan tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketepatan pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan jadwal perencanaan.
3. Serta dalam rangka mengembangkan industri hasil hutan dan perkebunan hal-hal yang dapat dilakukan adalah pengembangan hilirisasi industri, penguatan standar melalui SNI Wajib, SKKNI, dan menumbuhkan industri-industri baru seperti produksi masterbatch untuk aditif aspal karet, pengembangan industri serat rayon, meningkatkan *recovery rate* kertas bekas di dalam negeri untuk bahan baku produksi kertas, dan pengembangan hilirisasi industri kelapa sawit.

## PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan  
Tahun : 2019

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kegiatan	2019			Keterangan
	Strategis (SS)	(IK)					T	R	C	
1	Meningkatnya peran industri hasil hutan dan perkebunan dalam perekonomian nasional	1 Laju pertumbuhan PDB industri hasil hutan dan perkebunan	2,54 persen	2,07 persen	81,5	a. Penyusunan Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Tarif Bea Keluar Dan Tarif Dana Perkebunan Terhadap Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit Nasional	960.000.000	959.011.250	99,90	Saat melambatnya pertumbuhan ekonomi global dampak terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, perekonomian Indonesia tetap tumbuh 5,02% pada triwulan III 2019 (YoY). Dibandingkan dengan perekonomian Singapura yang mengalami perlambatan dan hanya tumbuh 0,1% (YoY) maupun Thailand 2,3% (TW II 2019). Beberapa faktor yang menahan laju pertumbuhan PDB antara lain terjadi inflasi sebesar 0,15 persen (q-to-q), Namun jika dibandingkan dengan posisi September 2018, terjadi inflasi sebesar 3,39 persen (YoY). Selain itu, penyaluran kredit tertahan karena penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) tidak langsung diikuti oleh penurunan suku bunga kredit.

		2	Kontribusi PDB industri hasil hutan dan perkebunan terhadap PDB nasional	1,60 persen	1,44 persen	90	b. Pengembangan Proses Produksi Dan Bahan Baku Alternatif Untuk Industri Rayon	1.584.500.000	1.557.365.000	98,29	Konsumsi rumah tangga (RT) yang masih tumbuh di atas 5% menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, konsumsi RT berkontribusi sebesar Rp 2.298,9 triliun atau 56,52% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang mencapai Rp 4.067,8 triliun pada triwulan III tahun ini. Sementara ekspor barang dan jasa hanya menyumbang Rp 762,8 triliun atau 21,85% dari PDB nasional.
		3	Penyerapan tenaga kerja di sektor industri hasil hutan dan perkebunan	2,84 juta orang	2,77 juta orang	97,5	c. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas IHHP	1.426.405.000	1.357.036.760	95,14	Data Produk Domestik Bruto (PDB) jasa pada tahun 2019 tumbuh signifikan. Data BPS pada kuartal III mencatat bahwa sektor transportasi dan pergudangan yang mendukung perdagangan daring (e-commerce) tumbuh 5,64 persen secara tahunan. Pada saat yang sama, pertumbuhan PDB sektor informasi dan komunikasi juga tumbuh sebesar 8,98 persen. Pertumbuhan kedua sektor tersebut bahkan lebih tinggi dibanding ekonomi kuartal III 2018 yang hanya 5,17 persen, sehingga, ini dapat menjadi faktor dimana pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen tidak diikuti dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.
2	Meningkatnya populasi dan persebaran industri hasil hutan dan perkebunan	4	Unit industri hasil hutan dan perkebunan besar sedang yang tumbuh*)	116 - 127 unit usaha	710 unit usaha	559	a. Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Atsiri Nasional	949.000.000	948.408.180	99,94	

		5	Nilai investasi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan*)	54,1 trilyun rupiah	16,45 trilyun rupiah	30,4	b. Invesment Catalogue Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	938.000.000	937.460.700	99,94
3	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri hasil hutan dan perkebunan	6	Kontribusi ekspor produk industri hasil hutan dan perkebunan terhadap ekspor nasional*)	10,48 persen	17,61 persen	168	c. Sni Yang Disusun/direvisi, Diberlakukan Dan Diawasi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan d. Perusahaan Berbasis Hasil Hutan Dan Perkebunan Yang Menerapkan Standar Mutu e. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional f. Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Dan Rotan Serta Konsep Desain Industri Furniture Yang Diterima Pasar Internasional	1.907.785.000 1.464.000.000 760.554.000 2.200.000.000	1.847.969.744 1.440.703.210 733.260.444 2.080.885.901	96,86 98,41 96,41 94,59
		7	Produktivitas SDM industri hasil hutan dan perkebunan*)	288,1 juta perorang pertahun	319,57 juta perorang pertahun	110,9	g. Pelatihan SDM Di Sektor Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	3.350.000.000	2.460.263.930	73,44
4	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	8	Infrastruktur kompetensi yang terbentuk:	3 [R]SKKNI	3 [R]SKKNI	100	a. Rancangan Skkni/kkni Yang Disusun/direvisi Di Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	1.325.240.000	1.260.988.155	95,15
5	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	9	Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang diblokir	20 persen	4,51 persen	443	a. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha	1.960.000.000	1.908.626.996	97,38